



**Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar**

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2023**





KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan ridho-Nya, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun dan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar tepat pada waktunya. Penyusunan RLPPD Tanah Datar ini disusun dalam upaya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana dalam ketentuan tersebut bahwa Bupati selaku penyelenggara pemerintah daerah kabupaten wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun menyampaikan ringkasan laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat sebagai bahan informasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah turut serta dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar selama ini, serta kepada semua unsur yang telah berkontribusi dalam penyusunan RLPPD ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus membangun dalam upaya mewujudkan Kabupaten Tanah Datar yang lebih baik dan sejahtera. Amin

Batusangkar, Maret 2024

BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA, SE, MM



BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Penurunan Jumlah Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per kapita dan ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Analisa capaian kinerja makro Pembangunan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	74,87	75,57	0,93
2.	Angka Kemiskinan (%)	4,26	4,16	(2,35)
3.	Angka Pengangguran (%)	5,91	5,35	(9,48)
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,16	4,44	6,73
5.	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	39,72	42,90	8
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,251	0,260	3,59

Sumber : BPS Sumbar, 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak (pengeluaran perkapita) dan juga mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu.

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 adalah 75,57, meningkat sebesar 0,93% dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,87.

IPM Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 berada sedikit dibawah nilai IPM Provinsi Sumatera Barat 75,64 namun diatas IPM nasional 74,39, selanjutnya jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten se-Sumatera Barat IPM Kabupaten Tanah Datar berada di urutan pertama.

2. Angka Kemiskinan

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat di ukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar 4,26% dan pada tahun 2023 angka kemiskinan menurun sebesar 2,35% sehingga menjadi 4,16%.

Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta dengan melibatkan seluruh stakeholder.

3. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Hal ini masih perlu menjadi perhatian, karena berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi hidup beban sosial serta mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Pengangguran merupakan masalah yang harus diselesaikan pemerintah dalam era globalisasi ini karena selain ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi juga dengan semakin berhasilnya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.



Angka pengangguran Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 adalah sebesar 5,35%, angka ini mengalami penurunan sebesar 9,48% dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 5,91%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah. Berdasarkan penghitungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada 2 (dua) tahun terakhir, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sebesar 4,44% atau tumbuh sebesar 6,73% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 4,16%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 berdampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi adalah pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 27,61%, yang kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,02% dan konstruksi sebesar 10,52%.

5. Pendapatan Per Kapita

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya bisa diukur menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktivitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar Rp42.899,63 ribu sedangkan pada tahun 2022 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.39.722,35 ribu, terjadi peningkatan sebesar 8%. Hal ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar $\pm$ Rp. 3.575.000,-/bulan atau berada di atas Upah Minimal Provinsi Sumatera Barat.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk secara menyeluruh. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya



adalah Gini Ratio atau Indeks Gini yang membagi kesenjangan atau ketimpangan dalam kriteria:

1. $G < 0,30$ berarti Ketimpangan Rendah
2. $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti Ketimpangan Sedang
3. $> 0,50$ berarti Ketimpangan Tinggi

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa Gini Ratio Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 adalah sebesar 0,260 dan mengalami kenaikan sebesar 3,59% dari angka tahun 2022 sebesar 0,251. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara penduduk di Kabupaten Tanah Datar masuk kategori rendah.



BAB II CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR TAHUN 2023

2.1 URUSAN PENDIDIKAN

2.1.1 Realisasi SPM Urusan Pendidikan

Realisasi pencapaian SPM adalah capaian atas target SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

a) Pendidikan PAUD

Tabel 4.5

Realisasi SPM Pendidikan PAUD

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
	Jumlah Yang Harus Dilayani	7.620	7.620	0	100%
1.	Angka Partisipasi sekolah	66.65	66.65	0	100%
2.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	46.88	46.88	0	100%
3.	Pertumbuhan pendidikan PAUD di S1/DIV	74.49	74.49	0	100%
4.	Angka Partisipasi sekolah	1.5	1.5	0	100%
5.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0,42	0,42	0	100%
6.	Indeks distribusi guru	41.1	41.1	0	100%
7.	Proporsi PTK bersertifikat	0.64	0.64	0	100%
8.	Proporsi PTK penggerak	0.28	0.28	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

b) Pendidikan Dasar

1) SD

Tabel 4.6

Realisasi SPM Pendidikan SD

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
	Jumlah Yang Harus Dilayani	54.710	54.710	0	100%
1.	Angka partisipasi kasar	100	101,63	0	100%



No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
2.	Angka partisipasi sekolah	98.7	98.7	0	100%
3.	Angka partisipasi murni	92.54	92.54	0	100%
4.	Kemampuan literasi	70.64	70.64	0	100%
5.	Kemampuan numerasi	52.90	52.90	0	100%
6.	Perbedaan Skor Literasi	2.59	2.59	0	100%
7.	Perbedaan Skor numerasi	1.13	1.13	0	100%
8.	Indeks iklim keamanan	70.97	70.97	0	100%
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	64.23	64.23	0	100%
10.	Indeks distribusi guru	0.41	0.41	0	100%
11.	Proporsi PTK bersertifikat	89.1	89.1	0	100%
12.	Proporsi PTK penggerak	0.1	0.1	0	100%
13.	Pengalaman pelatihan guru	66.4	66.4	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

2) SMP

Tabel 4.7

Realisasi SPM Pendidikan SMP

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
1.	Angka partisipasi kasar	100	109,16	0	100%
2.	Angka partisipasi sekolah	96.55	96.55	0	100%
3.	Angka partisipasi murni	88.05	88.05	0	100%
4.	Kemampuan literasi	82.12	82.12	0	100%
5.	Kemampuan numerasi	62.09	62.09	0	100%
6.	Perbedaan skor literasi	3.19	3.19	0	100%
7.	Perbedaan skor numerasi	0.96	0.96	0	100%
8.	Indeks iklim keamanan	69.59	69.59	0	100%
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	62.56	62.56	0	100%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	68.84	68.84	0	100%
11.	Indeks distribusi guru	0.36	0.36	0	100%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	93.9	93.9	0	100%
13.	Proporsi PTK penggerak	0.14	0.14	0	100%
14.	Pengalaman pelatihan guru	55.3	55.3	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023



c) Pendidikan Kesenjangan

Tabel 4.8

Realisasi SPM Pendidikan Kesenjangan

No.	Indikator	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia (Realisasi)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	% Capaian
	Jumlah yang harus dilayani	1.371	1.371	0	100%
1.	Angka partisipasi kasar	0	0	0	0
2	Angka partisipasi sekolah	1.371	1.371	0	100%
3	Angka partisipasi murni	0	0	0	0
4	Kemampuan literasi	0	0	0	0
5	Kemampuan numerasi	0	0	0	0
6	Perbedaan skor literasi	0	0	0	0
7	Perbedaan skor numerasi	0	0	0	0
8	Indeks iklim keamanan	0	0	0	0
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0	0	0	0
10	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	0
11	Indeks distribusi guru	0	0	0	0
12	Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0	0
13	Proporsi PTK penggerak	0	0	0	0
14	Pengalaman pelatihan guru	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

2.1.2 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.9

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan

NO	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				89.345.363.701	83.446.135.415	5.899.228.286	93,40
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				89.345.363.701	83.446.135.415	5.899.228.286	93,40
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				54.744.850.701	51.786.552.158	2.958.298.543	94,60
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	1 ruang	1 ruang	100	199.780.000	196.610.810	3.169.190	98,41



NO	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
2	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	4 ruang	4 ruang	100	325.683.600	323.838.500	1.845.100	99,43
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24 unit	23 unit	96	2.186.453.467	1.773.997.896	412.455.571	81,14
4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	20 unit	20 unit	100	4.501.190.600	3.821.801.498	679.389.102	84,91
5	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	10 paket	10 paket	100	347.286.000	325.732.120	21.553.880	93,79
6	Pengadaan Mebel Sekolah	2 paket	2 paket	100	90.000.000	86.946.000	3.054.000	96,61
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	8 paket	8 paket	100	162.890.000	157.278.904	5.611.096	96,56
8	Pengadaan perlengkapan siswa	8.208 orang	8.208 orang	100	2.844.180.000	2.471.267.500	372.912.500	86,89
9	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	4 paket	4 paket	100	1.029.340.000	998.429.600	30.910.400	97,00
10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	306 sekolah	306 sekolah	100	47.690.000	26.100.200	21.589.800	54,73
11	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	5 cabang	5 cabang	100	59.420.000	50.623.600	8.796.400	85,20
12	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Dasar	801 orang	801 orang	100	6.686.920.000	5.637.886.800	1.049.033.200	84,31
13	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	711 orang	711 orang	100	478.480.000	161.933.605	316.546.395	33,84
14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	306 sekolah	306 sekolah	100	18.460.000	16.304.400	2.155.600	88,32
15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	306 sekolah	306 sekolah	100	33.682.700.000	33.684.565.225	(1.865.225)	100,0 1
16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	306 sekolah	306 sekolah	100	58.500.000	47.027.800	11.472.200	80,39
17	Pembangunan Laboratorium Sekolah	9 unit	9 unit	100	2.025.877.034	2.006.207.700	19.669.334	99,03
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				24.443.520.000	21.854.411.372	2.020.477.028	89,41
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 unit	1 unit	100	568.631.600	489.432.741	79.198.859	
2	Pembangunan Perpustakaan sekolah	1 ruang	1 ruang	100	552.448.000	494.163.048	58.284.952	89,45
3	Pembangunan Laboratorium Sekolah	2 unit	2 unit	100	1.240.994.398	1.066.521.684	174.472.714	85,94
4	Pembangunan Asrama Sekolah	1 unit	1 unit	100	2.298.460.000	1.969.463.805	328.996.195	85,69
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 unit	4 unit	100	1.875.244.000	1.673.646.216	201.597.784	89,25
6	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1 unit	1 unit	100	103.132.000	-	103.132.000	-



NO	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
7	Rehabilitasi ruang unit kesehatan sekolah	1 ruang	1 ruang	100	47.626.000	46.643.750	982.250	97,94
8	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	1 ruang	1 ruang	100	331.875.001	270.317.221	61.557.780	81,45
9	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	3 paket	2 paket	60	107.779.001	77.217.019	30.561.982	71,64
10	Pengadaan Perlengkapan siswa	5042 orag	5042 orag	100	2.210.840.000	1.960.989.900	249.850.100	88,70
11	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	5 paket	5 paket	100	190.000.000	189.106.300	893.700	99,53
12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	4.006 orang	4.006 orang	100	344.720.000	279.597.517	65.122.483	81,11
13	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	5 cabang	5 cabang	100	60.410.000	49.770.200	10.639.800	82,39
14	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	360 orang	360 orang	100	1.991.590.000	1.831.072.500	160.517.500	91,94
15	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	566 orang	566 orang	100	517.270.000	216.360.060	300.909.940	41,83
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	56 sekolah	56 sekolah	100	10.000.000	4.227.000	5.773.000	42,27
17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56 sekolah	56 sekolah	100	11.973.000.000	11.708.546.752	264.453.248	97,79
18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56 sekolah	56 sekolah	100	19.500.000	16.768.400	2.731.600	85,99
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini				8.320.083.000	7.905.973.149	414.109.851	95,02
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 unit	1 unit	100	123.630.140	122.514.984	1.115.156	99,10
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 unit	4 unit	100	633.638.540	632.329.953	1.308.587	99,79
3	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	6 unit	6 unit	100	387.399.320	385.946.406	1.452.914	99,62
4	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	150 paket	150 paket	100	80.000.000	38.387.500	41.612.500	47,98
5	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	17 paket	17 paket	100	188.000.000	182.543.000	5.457.000	97,10
6	Penyelenggaraan Proses Belajar Paud	150 siswa	150 siswa	100	90.000.000	82.344.200	7.655.800	91,49
7	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Paud	714 orang	714 orang	100	1.348.570.000	1.256.925.300	91.644.700	93,20



NO	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
8	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Paud	50 orang	50 orang	100	336.135.000	127.783.310	208.351.690	38,02
9	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Paud	346 lembaga	346 lembaga	100	95.710.000	93.292.100	2.417.900	97,47
10	Pengelolaan Dana BOP Paud	346 lembaga	346 lembaga	100	5.037.000.000	4.983.906.396	53.093.604	98,95
D	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				1.836.910.000	1.409.765.995	427.144.005	76,75
1	Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	2 paket	2 paket	100	38.450.000	3.973.000	34.477.000	10,33
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100 peserta didik	100 peserta didik	100	24.010.000	15.159.850	8.850.150	63,14
3	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	57 orang	57 orang	100	199.450.000	140.346.400	59.103.600	70,37
4	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	35 orang	35 orang	100	90.000.000	68.170.745	21.829.255	75,75
5	Pembinaan kelembagaan manajemen pendidikan nonformal/kesetaraan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	10.000.000	5.416.000	4.584.000	54,16
6	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8 satuan pendidikan	8 satuan pendidikan	100	1.475.000.000	1.176.700.000	298.300.000	79,78
Total					89.345.363.701	83.446.135.415	5.899.228.286	93,4

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Sesuai tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 89.345.363.701 dengan realisasi Rp 83.446.135.415 atau 93,4%.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil pencapaian kinerja SPM Urusan Pendidikan dari masing-masing bidang, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa pencapaian SPM Urusan Pendidikan telah mencapai 100%.

2.2 URUSAN KESEHATAN

2.2.1 Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan pada tahun 2023, sebagai berikut:



Tabel 4.13

Realisasi dan Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI		
				(JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2,732	2,732	0	100
	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)		342	342	0	100
	2	Tablet tambah darah		245,880	245,880	0	100
	3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan		2,732	2,732	0	100
	4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB		2,732	2,732	0	100
	5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah		2,732	2,732	0	100
	6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin		410	410	0	100
	7	Kartu ibu/rekam medis ibu		2,732	2,732	0	100
	8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		2,732	2,732	0	100
	9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan		95	88	7	92.63
	10	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	11	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)		2,732	2,732	0	100
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2,657	2,657	0	100
	1	Formulir Partograf		2,657	2,657	0	100
	2	Kartu ibu (rekam medis)		2,657	2,657	0	100
	3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		2,657	2,657	0	100
	4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan		95	88	7	92.63
	5	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	6	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	2,653	2,653	0	100
	1	Vaksin Hepatitis B0		2,653	2,653	0	100
	2	Vitamin K1 injeksi		2,653	2,653	0	100
	3	Salep/tetes mata antibiotik		2,653	2,653	0	100
	4	Formulir bayi baru lahir		2,653	2,653	0	100
	5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)		7,959	7,959	0	100
	6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		2,732	2,732	0	100
	7	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak		96	89	7	92.71



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI		
				(JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	8	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	9	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	11,903	11,903	0	100
	1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku		11,903	11,903	0	100
	2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)		11,903	11,903	0	100
	3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)		2,732	2,732	0	100
	4	Vitamin A Biru		23,806	23,806	0	100
	5	Vitamin A Merah		1,851	1,851	0	100
	6	Vaksin imunisasi dasar: HBO		2,653	2,653	0	100
	7	Vaksin imunisasi dasar: BCG		885	885	0	100
	8	Vaksin imunisasi dasar: Polio		10,612	10,612	0	100
	9	Vaksin imunisasi dasar: IPV		1,327	1,327	0	100
	10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib		3,208	3,208	0	100
	11	Vaksin imunisasi dasar: Campak		885	885	0	100
	12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella		885	885	0	100
	13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib		7,547	7,547	0	100
	14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak		1,624	1,624	0	100
	15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella		1,624	1,624	0	100
	16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)		26,095	26,095	0	100
	17	Peralatan Anafilaktik		635	635	0	100
	18	Tenaga kesehatan : Dokter		91	84	7	92.31
	19	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	20	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		67	44	23	65.67
	22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan		3,060	3,060	0	100
	23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD		1	1	0	100
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	38,726	38,726	0	100
	1	Buku raport kesehatanku		38,726	38,726	0	100
	2	Buku pemantauan kesehatan		38,726	38,726	0	100
	3	Kuesioner skrining kesehatan		38,726	38,726	0	100
	4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah		659	659	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI		
				(JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah		21	21	0	100
	6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi		128	110	18	85.94
	7	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	8	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		67	44	23	65.67
	10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat		25	22	3	88.00
	11	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan		3,060	3,060	0	100
	12	Tenaga Non kesehatan : Guru		158	158	0	100
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	97,825	97,825	0	100
	1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		46	46	0	100
	2	Alat ukur berat badan		240	240	0	100
	3	Alat : Alat ukur tinggi badan		240	240	0	100
	4	Alat : Alat ukur lingkar perut		240	240	0	100
	5	Alat : Tensimeter		240	240	0	100
	6	Alat : Glukometer		92	92	0	100
	7	Alat : Tes strip gula darah		97,825	97,825	0	100
	8	Alat : Lancet		97,825	97,825	0	100
	9	Alat : Kapas alkohol		97,825	97,825	0	100
	10	Alat : KIT IVA Tes		24	24	0	100
	11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		23	23	0	100
	12	Tenaga kesehatan : Dokter		91	84	7	92.31
	13	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	14	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		67	44	23	65.67
	16	Tenaga Kesehatan Masyarakat		25	22	3	88.00
	17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu		750	750	0	100
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	17,839	17,839	0	100
	1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol		17,839	17,839	0	100
	2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket		17,839	17,839	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI		
				(JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
		Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)					
	3	Buku kesehatan lansia		10,200	10,200	0	100
	4	Tenaga kesehatan : Dokter		91	84	7	92.31
	5	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	6	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		67	44	23	65.67
	8	Tenaga Kesehatan Masyarakat		25	22	3	88.00
	9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu		750	750	0	100
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	55,372	55,372	0	100
	1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		46	46	0	100
	2	Tensimeter		240	240	0	100
	3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		23	23	0	100
	4	Tenaga kesehatan : Dokter		91	84	7	92.31
	5	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	6	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	7	Tenaga Kesehatan Masyarakat		25	22	3	88.00
	8	Obat Hipertensi		55,372	55,372	0	100
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	2,278	2,278	0	100
	1	Alat : Glukometer		92	92	0	100
	2	Alat : Strip Tes Gula Darah		2,278	2,278	0	100
	3	Alat : Kapas Alkohol		2,278	2,278	0	100
	4	Alat : Lancet		2,278	2,278	0	100
	5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		23	23	0	100
	6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		46	46	0	100
	7	Tenaga kesehatan : Dokter		91	84	7	92.31
	8	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	9	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		67	44	23	65.67
	11	Tenaga Kesehatan Masyarakat		25	22	3	88.00
	12	Obat Diabetes Melitus		2,278	2,278	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI		
				(JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	735	735	0	100
	1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		23	23	0	100
	2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi		23	23	0	100
	3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan		735	735	0	100
	4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		46	46	0	100
	5	Tenaga kesehatan : Dokter		91	84	7	92.31
	6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa		23	23	0	100
	7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya		23	23	0	100
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3,000	3,000	0	100
	1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)		4	4	0	100
	2	Reagen Zn TB		3,000	3,000	0	100
	3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95		3,600	3,600	0	100
	4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering		6,000	6,000	0	100
	5	Catridge tes cepat molekul		3,000	3,000	0	100
	6	Formulir pencatatan dan pelaporan		32	32	0	100
	7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)		32	32	0	100
	8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru		98	90	8	91.84
	9	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)		60	46	14	76.67
	11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen		8	7	1	87.50
	12	Tenaga kesehatan masyarakat		25	22	3	88.00
	13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu		280	280	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI		
				(JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	4,542	4,542	0	100
	1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)		4	4	0	100
	2	Tes cepat HIV (RDT) pertama		4,542	4,542	0	100
	3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai		4,542	4,542	0	100
	4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK		4,542	4,542	0	100
	5	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin		96	89	7	92.71
	6	Tenaga kesehatan : Perawat		404	404	0	100
	7	Tenaga kesehatan : Bidan		478	385	93	80.54
	8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)		60	46	14	76.67
	9	Tenaga kesehatan masyarakat		25	22	3	88.00
	10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu		100	100	0	100

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

2.2.2 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan kesehatan pada tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.14

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,452,798,240	2,218,090,905	90.43
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	406,035,000	222,393,742	54.77



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
	(UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	417,614,640	228,471,700	54.71
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	346,464,000	214,280,400	61.85
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	300,000,000	225,070,691	75.02
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	300,000,000	196,545,485	65.52
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	300,000,000	208,349,961	69.45
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	373,700,000	242,569,575	64.91
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	338,825,000	214,791,520	63.39
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	359,462,500	224,050,460	62.33
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	290,000,000	283,713,925	97.83
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	300,000,000	287,901,115	95.97
Total				6,184,899,380	4,766,229,479	77.06

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,184,899,380 dengan realisasi Rp 4,766,229,479 atau 77,06%.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pencapaian kinerja SPM Urusan Kesehatan dari masing-masing bidang, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 99,10%.

2.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

2.3.1 Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.18

Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
					JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari						82,34%
	1.	Yang Harus Terlayani	orang	376.018	293.006	83.012	78 %
	2	Mutu Barang/ Jasa					20 %



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	a. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah (SR)	51.943	51.943	0	100 %
	b. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah (SR)	51.943	51.943	0	100 %
	c. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	38.861	38.861	0	100 %
	d. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	38.861	38.861	0	100 %
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					80,80
	1. Yang Harus Terlayani		376.018	285.754	90,264	76
	2 Mutu Barang/ Jasa					100
	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)		89.438	89.438	0	100
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)		89.438	89.438	0	100
	c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)		1	1	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	d. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)		446	446	0	100
	e. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)		1	1	0	100

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2023

2.3.2 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.19

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	1.896.956.844	1.672.084.563	88,15
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	1.387.681.900	1.382.864.560	99,65
			Rehabilitasi/peningkatan/pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	196.317.700	194.407.290	99,03
	Total			3.480.956.444	3.249.356.413	93,35

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2023



Berdasarkan tabel diatas alokasi anggaran dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 3.480.956.444,- dengan realisasi Rp 3.249.356.413,- atau 93,35%.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pencapaian kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum dari masing-masing bidang, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 81,57%.

2.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

2.4.1 Realisasi Pencapaian SPM Daerah

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2023, sebagai berikut

Tabel 4.23

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
					JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota						100
	1.	Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	0
	2	Mutu Barang/ Jasa					0
		a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	0	0	0
		b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		0	0	0	0
		c. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		0	0	0	0
		d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana		0	0	0	0
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota						100
	1.	Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0	0	0	0
	2	Mutu Barang/ Jasa					0
		a. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan		0	0	0	0



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	b. Subsidi uang sewa	yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0
	c. Penyediaan rumah layak huni		0	0	0	0

Sumber: Dinas Perkim dan Lh Tahun 2023

- Catatan : 1. Pada tahun 2023 tidak terdapat Bencana skala daerah (Kabupaten Tanah Datar)
2. Pada tahun 2023 tidak terdapat relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2.4.2 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.24
**Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan
Tahun Anggaran 2023**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1.	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	8.000.000	7.109.050	88,86
2.	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	4.447.000	4.352.850	97,88
Total				12.447.000	11.461.900	92,09

Sumber: Dinas Perkim dan Lh Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.447.000 dengan realisasi Rp 11.461.900 atau 92,09%.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil pencapaian kinerja SPM Urusan Perumahan dari masing-masing bidang, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa SPM Urusan Perumahan Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 99,29%.



2.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.5.1 Realisasi dan Mutu Penerapan SPM Daerah

Satpol PP

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) pada tahun 2023, sebagai berikut

Tabel 4.29

Realisasi dan Penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
					JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi		Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	100%			100
	1.	Yang Harus Terlayani		1	1	-	100
	2	Mutu Barang/ Jasa		100%	100%	-	100
		2.6 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		1	1	-	100
		2.7 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan		1	1	0 -	100
		2.8 Standar operasional prosedur Satpol PP		6	6	0-	100
		2.9 Standar sarana prasarana Satpol PP		198	78	-32	100
		2.10 Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat		61	29	32-	100
		2.11 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		1	1	0-	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

Damkar

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Damkar, sebagai berikut:



Tabel 4.30

Realisasi dan Penerapan SPM Sub Urusan Damkar

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSentase (%)
I	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100%
1.	Yang Harus Terlayani	405 Orang	405 Orang	405 Orang	405 Orang	100%
2.	Mutu Barang/ Jasa					100%
	a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15 Menit	73 kali	69 kali	4 kali	94,5%
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	6 SOP	6 SOP	6 SOP	0	100%
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	333 Item	333 Item	217 Item	116 Item	65,17%
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	60 Personil	60 Personil	56 Personil	4 Personil	93,33%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

2.5.2 Alokasi Anggaran**Satpol-PP**

Alokasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.31

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Bidang Trantibum

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.022.059.400	1.006.119.611	98,44%
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	51.740.000	36.258.494	70,08%
			Pencegahan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.000.000	94.904.500	99,90%



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
			Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	47.000.000	46.800.000	99,57%
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan tibum			
2.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	Kegiatan Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	10.320.000	10.200.000	98,84%
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah	1.697.306.300	1.692.400.405	99,71%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran	5.000.000	4.875.000	97,50%
		Investasi Kejadian Kebakaran	Investasi Kejadian Kebakaran meliputi penelitian, pengujian penyebab kejadian kebakaran	10.046.000	9.848.000	98,03%
Total				2.938.471.700	2.901.406.010	98,74%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.938.471.700 dengan realisasi Rp 2.901.406.010 atau 98,74%.

Damkar

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Pemadam Kebakaran (Damkar) pada tahun 2023, sebagai berikut :



Tabel 4.32

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Bidang Damkar

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	23,199,975	23,132,600	99,71
			2. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1,930,574,400	1,930,375,600	99.99
Total				1,953,774,375	1,953,508,200	98.99

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemadam kebakaran Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,953,774,375 dengan realisasi Rp 1,953,508,200 atau 98,99%.

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebencanaan, sebagai berikut:

Tabel 4.33

Realisasi dan Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HRUSDILAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH YANG BELUM DITANGANI	PERSEN TASE (%)
I	Pelayanan informasi rawanbencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	380.727	380.727	0	100
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana		1	1	0	100
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		380.727	380.727	0	100
3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana		380.727	380.727	0	100
4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana		256.117	256.117	0	100
5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana		67	67	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS DILAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH YANG BELUM DITANGANI	PERSEN TASE (%)
II	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	380.727	380.727	0	100
	1 Sarana prasarana penanggulangan bencana		15	15	0	100
	2 Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)		21	6	15	28,57
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	380.727	380.727	0	100
	1. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		122.405	122.405	0	100
	2. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana		126	126	0	100
	3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		1	1	0	100
	4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		47	47	0	100
	5. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas		-	-	0	0

Sumber: BPBD Tahun 2023

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja SPM Urusan Trantibum dan Linmas dari masing-masing bidang, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa pencapaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 97,68%.

2.6 URUSAN SOSIAL

2.6.1 Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.39

Realisasi Penerapan SPM Urusan Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara				100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
					JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	1.	Yang Harus Terlayani	penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	173	173	0	100
	2	Mutu Barang/ Jasa					
	1.	Layanan data dan pengaduan		1	1	0	100
	2.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		1	1	0	100
	3.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru		1	1	0	100
	4.	Penyediaan permakanan		173	173	0	100
	5.	Penyediaan sandang		1	1	0	100
	6.	Penyediaan alat bantu		1	1	0	100
	7.	Penyediaan perbekalan kesehatan		1	1	0	100
	8.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		1	1	0	100
	9.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar		1	1	0	100
	10.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		1	1	0	100
	11.	Akses ke layanan pendidikan		1	1	0	100
	12.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	13.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100
	1.	Yang Harus Terlayani		52	52	0	100
	2	Mutu Barang/ Jasa					
	1.	Layanan data dan pengaduan		1	1	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	2. Penyediaan permakanan		1	1	0	100
	3. Penyediaan sandang		1	1	0	100
	4. Penyediaan alat bantu		1	1	0	100
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan		1	1	0	100
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		1	1	0	100
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar		1	1	0	100
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		1	1	0	100
	9. Akses ke layanan pendidikan		1	1	0	100
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
	12. Layanan rujukan		52	52	0	100
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		1	1	0	100
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru		1	1	0	100
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan		1	1	0	100
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100
	1. Yang Harus Terlayani		202	202	0	100
	2. Mutu Barang/ Jasa					
	1. Layanan data dan pengaduan		1	1	0	100
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		1	1	0	100
	3. Penyediaan permakanan		202	202	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	4. Penyediaan sandang		1	1	0	100
	5. Penyediaan alat bantu		1	1	0	100
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan		1	1	0	100
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		1	1	0	100
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlanter		1	1	0	100
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		1	1	0	100
	10. Akses ke layanan pendidikan		1	1	0	100
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
	13. Layanan rujukan		1	1	0	100
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan		1	1	0	100
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru		1	1	0	100
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial				100
	1. Yang Harus Terlayani		1	1	0	100
	2. Mutu Barang/ Jasa					
	1. Layanan data dan pengaduan		1	1	0	100
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		1	1	0	100
	3. Penyediaan permakanan		1	1	0	100
	4. Penyediaan sandang		1	1	0	100
	5. Penyediaan alat bantu		1	1	0	100
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan		1	1	0	100
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		1	1	0	100



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
					JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSEN TASE (%)
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar			1	1	0	100
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak			1	1	0	100
	10.Akses ke layanan pendidikan			1	1	0	100
	11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			1	1	0	100
	12.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			1	1	0	100
	13.Layanan rujukan			1	1	0	100
	14.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan			1	1	0	100
	15.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru			1	1	0	100
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota				100%
	1.	Yang Harus Terlayani		180	180	0	100
	2	Mutu Barang/ Jasa					
	1.	Penyediaan permakanan		1	1	0	100
	2.	Penyediaan sandang		1	1	0	100
	3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		1	1	0	100
	4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		180	180	0	100
	5.	Pelayanan dukungan Psikososial		1	1	0	100

Sumber: Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2023

2.6.2 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial pada tahun 2023, sebagai berikut:



Tabel 4.40

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	0	0	0%
			Penyediaan Permakanan	750.000.000	702.000.000	93,60
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0	0	0
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	456.094.819	397.111.600	87,07
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.185.410.000	934.429.000	78,83
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0
2.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	0	0	0
			Penyediaan Sandang	0	0	0
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	121.644.000	109.174.000	89,75
Total				2.513.148.819	2.142.714.600	85,26

Sumber: Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa alokasi dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 urusan sosial telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.513.148.819 dengan realisasi Rp.2.142.714.600 atau 85,26%.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pencapaian kinerja SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari masing-masing bidang, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 100%.



BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

3.1 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Tanah Datar memperoleh nilai 3,1599 atau dengan kategori "Sedang".

3.2 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion).



BAB IV RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

A. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan, Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
PENDAPATAN	1.266.540.689.506,00	1.255.730.478.589,70	99,15
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	148.527.936.542,00	150.888.841.205,70	101,59
Pendapatan Pajak Daerah	30.838.830.939,00	26.713.135.250,98	86,62
Pendapatan Retribusi Daerah	10.108.003.800,00	8.002.633.451,00	79,17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.108.515.569,00	24.131.036.246,00	100,09
Lain-lain PAD Yang Sah	83.472.586.234,00	92.042.036.257,72	110,27
PENDAPATAN TRANSFER	1.114.692.752.964,00	1.101.636.135.974,00	98,83
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.038.475.146.358,00	1.044.585.434.850,00	100,59
Dana Perimbangan	945.428.456.358,00	951.538.744.850,00	100,65
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	74.105.465.000,00	74.105.465.000,00	100,00
Insentif Fiskal	18.941.225.000,00	18.941.225.000,00	100,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	76.217.606.606,00	57.050.701.124,00	74,85
Pendapatan Bagi Hasil	73.257.606.606,00	54.090.701.124,00	73,84
Bantuan Keuangan	2.960.000.000,00	2.960.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.320.000.000,00	3.205.501.410,00	96,55
Pendapatan Hibah	3.320.000.000,00	3.157.882.000,00	95,12
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	47.619.410,00	0,00
BELANJA	1.353.250.990.374,00	1.263.875.980.296,50	93,40
BELANJA OPERASI	1.031.367.338.670,00	955.299.324.197,00	92,62
Belanja Pegawai	614.147.755.481,00	580.584.953.955,00	94,54
Belanja Barang dan Jasa	358.774.184.446,00	324.792.448.240,00	90,53
Belanja Subsidi	575.000.000,00	128.028.333,00	22,27



Belanja Hibah	49.830.694.120,00	43.388.767.947,00	87,07
Belanja Bansos	8.039.704.623,00	6.405.125.722,00	79,67
BELANJA MODAL	147.550.332.271,00	139.528.482.640,50	94,56
Belanja Modal Tanah	410.000.000,00	29.713.000,00	7,25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.198.222.097,00	43.919.250.537,50	95,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.201.977.892,00	35.180.680.265,00	92,09
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.011.683.280,00	56.677.602.560,00	96,04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.693.449.002,00	3.689.612.188,00	99,90
Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	31.624.090,00	90,35
BELANJA TAK TERDUGA	2.789.486.800,00	954.498.507,00	34,22
Belanja Tak Terduga	2.789.486.800,00	954.498.507,00	34,22
BELANJA TRANSFER	171.543.832.633,00	168.093.674.952,00	97,99
Belanja Bagi Hasil	5.078.330.483,00	2.365.943.652,00	46,59
Belanja Bantuan Keuangan	166.465.502.150,00	165.727.731.300,00	99,56
SURPLUS / (DEFISIT)	(86.710.300.868,00)	(8.145.501.706,80)	9,39
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.710.300.868,00	87.712.467.869,58	100,00
Penggunaan SILPA	87.710.300.868,00	87.712.467.869,58	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	86.710.300.868,00	86.712.467.869,58	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	78.566.966.162,78	0,00





BAB V INOVASI DAERAH

5.1 Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Datar

Berikut beberapa Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar:

INOVASI DAERAH

No.	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	URUSAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	KASIH SIDINDA	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		KOPI SAKAREK	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		BESIBAJA	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		SILACAK (Sistem Pelacakan SPJ)	Keuangan
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	CATS MASKER	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	INSPEKTORAT DAERAH	KLINIK BINA KELUHAN KEUANGAN NAGARI ONLINE	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Inovasi Belajar Bagi Siswa Inklusi	Pendidikan
		GURU ON AIR	Pendidikan
		Klinik Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar	Pendidikan
	- SDN 14 Situmbuk	PAKAR (Selempang Karakter)	Pendidikan
	- SDN 03 Batu Bulek	Program Polisi Sekolah	Pendidikan
5	DINAS KESEHATAN	Si Kopi Kawa	Kesehatan
		Kiper TBC Empati (Kita Perangi Tuberkulosis dengan Empati)	Kesehatan



	- PUSKESMAS BATIPUH I	GEMAS ABAK BESTIE (GERAKAN MASYARAKAT PEDULI SANITASI DAN AIR MINUM LAYAK BATIPUH I ISTIMEWA)	Kesehatan
	- PUSKESMAS BATIPUH II	ASIKK TB	Kesehatan
	- PUSKESMAS BATIPUH III	KOLMI	Kesehatan
	- PUSKESMAS GURUN	SIKOPI KAWA	Kesehatan
	- PUSKESMAS LIMA KAUM II	DEPOSIT	Kesehatan
		GAYA PUSPAKU	Pemberdayaan masyarakat dan Desa
	- PUSKESMAS LINTAU BUO III	SIGOTIK (Slswa GOtong royong membasmi jenTIK)	Kesehatan
	- PUSKESMAS SALIMPAUNG I	GEMA HAJI (GERAKAN MASYARAKAT SEHAT JIWA)	Kesehatan
		AMAK PALALA (AMBULAN MENJEMPUT PARA LANSIA SALIMPAUNG)	Kesehatan
	- PUSKESMAS SALIMPAUNG II	KIPER TBC	Kesehatan
	- PUSKESMAS SINGGALANG	KEtuk Pintu unTuk Konseling KEsehatan LINGkungan (KEPITING KELING)	Kesehatan
		Sarasi Cerita (Sahabat Remaja Putri Singgalang Cerdas Sehat Tanpa anemia)	Kesehatan
	- PUSKESMAS X KOTO I	SIKOPI KAWA	Kesehatan
	- PUSKESMAS X KOTO II	"CUMA SERIBU SEHAT BISA CABUT GIGI"	Kesehatan
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	OPTIMALISASI SISTEM LAYANAN INFORMASI INFRASTRUKTUR MELALUI WEBSITE PUPRP DAN KOMUNITAS PEDULI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR (KOPI PAK TUR) DI KABUPATEN TANAH DATAR	Pekerjaan umum dan penataan ruang
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	"NAN RANCAK"	Lingkungan hidup
		SATU NAGARI SATU BANK SAMPAH (One	Lingkungan hidup



		Village One Garbage Bank)	
		Gerakan Menanam dan Merawat Bunga (MARAWA)	Lingkungan hidup
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SIPAPA BELI IKAN (Polisi Pamong Praja Peduli Pendidikan)	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	LAPEK (Layanan Pengaduan Edukasi dan Konsultasi)	Sosial
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SALAM KEBAHAGIAAN (SETELAH AKAD LANGSUNG MENERIMA KTP ELEKTRONIK, BUKU NIKAH DAN KARTU KELUARGA INSYA ALLAH AMANAH)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		LAI BASABA (LAYanan Identitas BAru SetelAh BercerAi)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		D'MOS (Dukcapil Melayani On School)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		KISS (Kado Identitas Sweet Seventeen)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		ALANG BABEGA (Anak LAhir Akta dataNG BAHagia BERSama keluarGA).	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		SARI MADU LEBAH (Setelah Bercerai Dokumen Administrasi Kependudukan Langsung Berubah)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		SAHABAT KASANOPA (SAtu Hati Banyak cinta banTu Keluarga SejahterA melalui penerbitaN dOkumen kePendudukan setiap keluargA)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		DM-OK (Dukcapil Membahana On Kecamatan)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Ruangan Khusus Pelayanan Konsultasi	Pemberdayaan masyarakat dan Desa



		Klik Lay BUM Nagari (Klinik Layanan Badan Usaha Milik Nagari)	Pemberdayaan masyarakat dan Desa
12	DINAS PERHUBUNGAN	Si - Diska (Sistem Informasi Dinas Perhubungan Terbuka)	Perhubungan
		Si-Diska Pangadu (Sistem Informasi Dinas Perhubungan Terbuka dan Pengaduan PJU)	Perhubungan
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sistem Administrasi Perkantoran Elektronik	Komunikasi dan informatika
		Sistem Informasi Administrasi Nagari (SIANA)	Komunikasi dan informatika
		Absensi Online	Komunikasi dan informatika
		Website PPID	Komunikasi dan informatika
		Sistem Jejaring Komunikasi Publik Stakeholder	Komunikasi dan informatika
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Inovasi Pelayanan Perizinan Terbit di Nagari (Inovasi Pelarian Diri)	Penanaman Modal
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ONE TRIP ONE BOOK	Perpustakaan
		Gerakan Sadar Tertib Arsip (Gesit)	Kearsipan
16	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	Pekan Segara (Pemasaran Ikan Segar dan Aman)	Kelautan dan perikanan
		Pangan Semerbak (pemanfaatkan pekarangan sebagai sumber bahan pangan keluarga)	Pangan
		Bazar Layanan Pangan Murah, Segar Aman Dan Halal (BALAY PAMURAH)	Pangan
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pesona Tanah Datar	Pariwisata
		Satu Nagari Satu Event	Pariwisata
18	DINAS PERTANIAN	JELITA (Jendela Hasil Bumi Kita)	Pertanian
		Pemasaran Online Lapau Tani (POLT)	Pertanian
		BOMBASTIS (Sistem Informasi Bantuan Operational Bajak Gratis)	Pertanian



19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENERAPAN SISTEM PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN TANAH DATAR (Si-PUTAR) BERBASIS INTERNET OF THINGS	Koperasi, usaha kecil, dan menengah
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Gugah Pedati (Menggugah Perangkat Daerah Untuk Berinovasi)	Penelitian dan Pengembangan
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Smart Tax Solution	Kuangan
		SP2D Online	Kuangan
22	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari)	Kuangan
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DARA MANUSIA	Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian	Kepegawaian
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB)	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
25	RSUD M.ALI HANAFIAH	TELUSUR MENGATASI MASALAH (TELURSIMAS)	Kesehatan
		SENIN BERKAH	Kesehatan
26	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nagari Bersinar	Sosial
		INOVASI REKOMENDASI PENELITIAN MENGGUNAKAN GOOGLE FORM	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
27	KECAMATAN X KOTO	WUDUK SUBUH (Wirid Umum Terpadu Kecamatan Sepuluh Koto Unggul Bersama Ummah)	Sosial
28	KECAMATAN BATIPUH	Program Batipuh OPEN (Optimalisasi Potensi Nagari)	Pemberdayaan masyarakat dan Desa
		Sistem Layanan Batipuah Online (SILABO)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
29	KECAMATAN RAMBATAN	CALLING	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		MISI SISTEMIK (MIGRASI KORESPONDENSI KE SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK)	Komunikasi dan informatika



		FOCUS ACTION COMMITMENT PBB-P2	Keuangan
30	KECAMATAN LIMA KAUM	RASA BAHAGIA (RAPAT SAMBIL BERBAGI HARTA DAN TAUSIYAH)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
31	KECAMATAN TANJUNG EMAS	BASIRAWA	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
32	KECAMATAN LINTAU BUO	PENGELOLAAN ARSIP KECAMATAN BERBASIS ELEKTRONIK, E-FILLING SIP (E-LING SIP)	Kearsipan
		TABUR BERKAH (LINTAU BUO SEJAHTERA BERSAMA INFAK DAN SEDEKAH)	Sosial
33	KECAMATAN SUNGAYANG	OPTIMALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN MELALUI FORUM KONSULTASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN (FORUM SiReNKe) DI KECAMATAN SUNGAYANG	Perencanaan
34	KECAMATAN SUNGAI TARAB	SUTERA BERKAH (SungaiTarab SejahtERA BERSama sedeKAH)	Pemberdayaan masyarakat dan Desa
35	KECAMATAN PARIANGAN	Perantau Peduli Pendidikan Anak Nagari (PAPI PENARI)	Pendidikan
36	KECAMATAN SALIMPAUNG	SIKAMEK PESEK (Sistem Tata Kelola Persuratan Berbasis Elektronik)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
37	KECAMATAN PADANG GANTING	ANTI MALAS (Ayo Niatkan haTI MANfaatkan LAhan Sekitar)	Lingkungan hidup
38	KECAMATAN TANJUNG BARU	Peluk Emas PHP	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
39	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA	Sistem Pelayanan Administrasi Masyarakat Masuk Jorong (SIMPELMASJOR)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Layanan Aspirasi dan Pengaduan Bantuan Sosial (LAPAS)	Sosial



40	KECAMATAN BATIPUH SELATAN	BERKELANA (Bersama Klinik Layanan Nagari)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PENUTUP

Laporan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tanah Datar Tahun 2023 ini disusun sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Laporan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tanah Datar Tahun 2023 ini juga disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian RLPPD Tanah Datar Tahun 2023 ini disusun, untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat sebagai bahan informasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Semoga RLPPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 ini dapat menjadi tolak ukur dan acuan, guna mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi. Terima kasih.

Batusangkar, Maret 2024

BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA, SE, MM